

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan Riant Nugroho serta faktor implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, berikut kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Salatiga:

1. Pembahasan mengenai implementasi kebijakan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Salatiga difokuskan pada sejauh mana ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2023 dijalankan secara nyata dalam praktik pemerintahan daerah. Analisis ini tidak hanya menilai kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan norma dan regulasi yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi capaian, keunggulan, serta berbagai keterbatasan yang muncul dalam proses implementasi.

a. Kesimpulan Umum

Implementasi kebijakan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Salatiga secara normatif telah mengacu pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2023 dan menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pelaksanaan kebijakan telah mencakup pengembangan layanan elektronik, pembentukan peran kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Pada

aspek manajemen SPBE, implementasi kebijakan justru menunjukkan kinerja yang lemah dan tidak efektif, ditandai oleh ketidaksinambungan antara perencanaan kebijakan dan praktik di lapangan, rendahnya konsistensi pelaksanaan, serta ketimpangan kualitas implementasi antar perangkat daerah. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan penilaian SPBE secara umum menutupi persoalan mendasar dalam pengelolaan manajemen SPBE di Kota Salatiga.

b. Aspek Positif

- 1) Keberadaan regulasi teknis memberikan kepastian hukum dan arah pelaksanaan manajemen SPBE bagi seluruh OPD.
- 2) Peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator SPBE mendorong terbentuknya integrasi layanan dan pengembangan aplikasi pemerintahan.
- 3) Pemanfaatan layanan digital mulai meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik.

c. Aspek Negatif

- 1) Lambatnya implementasi kebijakan manajemen SPBE terlihat dari belum meratanya penerapan standar manajemen SPBE di seluruh OPD, sehingga kualitas pelaksanaan kebijakan masih bervariasi antar unit kerja.
- 2) Ketergantungan pada sistem lama masih ditemukan dalam pelaksanaan layanan pemerintahan, yang berdampak pada rendahnya interoperabilitas dan efektivitas pengelolaan sistem elektronik.

- 3) Kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan SPBE menyebabkan pemanfaatan layanan digital belum optimal dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - 4) Mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasi manajemen SPBE belum berjalan secara konsisten dan terukur, sehingga perbaikan kebijakan sering bersifat reaktif dan tidak berbasis data yang komprehensif.
 - 5) Standarisasi prosedur operasional layanan SPBE belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara seragam oleh seluruh OPD.
2. Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Salatiga diarahkan untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi yang menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2023. Dengan demikian, bagian ini menguraikan secara sistematis gambaran umum faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, sekaligus memetakan aspek pendukung dan penghambat yang berperan dalam keberhasilan maupun kegagalan manajemen SPBE di Kota Salatiga.

a. Kesimpulan Umum

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan manajemen SPBE di Kota Salatiga menunjukkan adanya interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasi. Dukungan regulasi dan komitmen pimpinan daerah menjadi faktor pendukung utama

dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, dominasi faktor penghambat, terutama yang berkaitan dengan sumber daya dan kapasitas kelembagaan, menyebabkan implementasi kebijakan manajemen SPBE belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan SPBE tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan aktor pelaksana dan lingkungan implementasi.

b. Faktor-Faktor Keberhasilan

- 1) Dukungan pimpinan daerah memperkuat legitimasi kebijakan dan mempercepat pengambilan keputusan terkait pengembangan SPBE.
- 2) Keselarasan kepentingan aktor pelaksana kebijakan mengurangi resistensi terhadap penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- 3) Manfaat kebijakan SPBE mulai dirasakan melalui peningkatan transparansi dan efisiensi pelayanan publik.

c. Faktor-Faktor Kegagalan

- 1) Infrastruktur teknologi yang tidak merata menjadi faktor penghambat utama dalam pengelolaan manajemen SPBE, khususnya bagi OPD dengan keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi.
- 2) Kesenjangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang teknologi informasi memperlambat proses pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem SPBE.

- 3) Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang SPBE menyebabkan beban kerja terpusat pada individu atau unit tertentu.
- 4) Pola koordinasi antar OPD yang belum sepenuhnya efektif menghambat integrasi data dan sinkronisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- 5) Respons terhadap aduan dan kritik masyarakat terkait layanan SPBE belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam mekanisme evaluasi kebijakan, sehingga potensi perbaikan berbasis umpan balik belum dimanfaatkan secara optimal.

4.2 Saran

1. Saran terkait implementasi kebijakan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Salatiga disusun sebagai tindak lanjut atas temuan penelitian yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2023 dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Rekomendasi ini diarahkan untuk memperkuat konsistensi pelaksanaan kebijakan, meningkatkan efektivitas pengelolaan SPBE, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga perlu mempercepat implementasi kebijakan manajemen SPBE melalui penegakan standar manajemen SPBE yang bersifat wajib dan mengikat bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), disertai dengan penetapan tenggat waktu yang jelas, indikator capaian yang terukur, serta mekanisme sanksi

administratif bagi OPD yang tidak menunjukkan kemajuan dalam penerapan standar tersebut.

- b. Tim Koordinasi SPBE bersama Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo perlu merancang strategi transisi dari sistem lama ke sistem berbasis elektronik secara terencana dan bertahap melalui penyusunan peta jalan (roadmap) integrasi sistem, sehingga ketergantungan terhadap sistem manual dan aplikasi yang tidak terintegrasi dapat dikurangi secara sistematis tanpa mengganggu keberlangsungan layanan publik.
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga perlu memperkuat pola sosialisasi layanan SPBE kepada masyarakat melalui pendekatan langsung dan partisipatif, seperti kegiatan tatap muka di tingkat kelurahan, pendampingan komunitas, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, guna meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan layanan SPBE oleh seluruh lapisan masyarakat.
- d. Inspektorat Daerah bersama Tim Monitoring dan Evaluasi SPBE perlu membenahi mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasi manajemen SPBE dengan membangun sistem evaluasi berbasis data yang dilakukan secara berkala dan konsisten, mencakup pengukuran kinerja OPD, tingkat pemanfaatan layanan, serta dampak SPBE terhadap kualitas pelayanan publik.
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga perlu menyusun dan mensosialisasikan standar prosedur operasional (SOP) layanan SPBE secara lebih rinci dan aplikatif, disertai dengan pelatihan teknis kepada

aparatur pelaksana, sehingga standar tersebut tidak hanya bersifat administratif tetapi benar-benar dipahami dan diterapkan secara seragam oleh seluruh OPD.

2. Saran terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan manajemen SPBE di Kota Salatiga dirumuskan berdasarkan identifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan dalam penelitian. Rekomendasi ini bertujuan untuk mengatasi kendala struktural, sumber daya, dan koordinasi kelembagaan yang selama ini membatasi efektivitas implementasi kebijakan, sehingga pengembangan manajemen SPBE dapat berjalan secara lebih optimal dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga perlu melakukan pemerataan infrastruktur teknologi informasi melalui prioritas penganggaran yang berbasis kebutuhan riil OPD, termasuk penyediaan jaringan, perangkat keras, dan sistem pendukung yang memadai bagi OPD yang selama ini mengalami keterbatasan sarana dan prasarana teknologi.
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat langsung dalam pengelolaan SPBE di lingkungan OPD perlu melakukan peningkatan kompetensi di bidang teknologi informasi secara berkelanjutan melalui program pelatihan yang terstruktur, sertifikasi teknis, serta pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan jabatan, khususnya bagi ASN yang terlibat langsung dalam pengelolaan SPBE.

- c. Bagian Organisasi dari Sekretariat Daerah perlu menambah dan mendistribusikan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang SPBE secara proporsional pada setiap OPD, sehingga beban kerja tidak terpusat pada individu atau unit tertentu dan keberlanjutan pengelolaan sistem dapat terjaga.
- d. Sekretaris Daerah bersama Tim Koordinasi SPBE perlu memperkuat pola koordinasi antar OPD melalui pembentukan mekanisme kerja lintas sektor yang bersifat formal dan berkelanjutan, termasuk forum koordinasi rutin, integrasi perencanaan SPBE, serta penggunaan platform bersama untuk pertukaran data dan informasi antar perangkat daerah.
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga bersama unit pengelola layanan pengaduan SPBE perlu mengintegrasikan sistem pengelolaan aduan dan kritik masyarakat terkait layanan SPBE secara langsung ke dalam mekanisme evaluasi kebijakan, sehingga umpan balik masyarakat tidak hanya ditangani secara administratif, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan layanan dan pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan SPBE.